

Krisis Nuklir Iran Dan Pergeseran Perimbangan Kekuatan Di Kawasan Timur Tengah

Zumrizal Labolo

Latar Belakang

Persoalan mengenai program pengayaan uranium yang dikembangkan oleh Iran, telah menjadi isu utama dan bahkan menjadi hangat diperbincangkan dalam percaturan politik dunia internasional, di mana negara-negara yang secara nyata mengembangkan pengayaan uranium, diduga mampu memproduksi senjata nuklir, dan dapat memberikan ancaman terhadap negara-negara lain, baik terhadap negara-negara sesama yang me-

ngembangkan program uranium maupun pada negara-negara yang tidak melakukan pengembangan uranium (negara-negara yang tergabung pada kesepakatan perjanjian Non Proliferasi/*NPT*).

Kondisi ini lahir sebagai klimaks dari pertentangan kepentingan yakni antara kepentingan Amerika Serikat di satu sisi dan kepentingan Revolusi Islam Iran di sisi lain. Perdebatan-perdebatan menjadi harga yang pantas untuk menarik benang merah persoalan yang terus mengalami pembiasaan, pada akhirnya mempengaruhi

arah kebijakan politik luar negeri masing-masing negara yang saling bertikai. Hal ini pula yang kemudian mendorong masyarakat internasional untuk terus berupaya mencari *road map* perdamaian atas konflik yang berkepanjangan. Khususnya terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah yang merasa prihatin atas konflik yang terjadi, karena secara tidak langsung mempengaruhi atau mengancam keamanan regional di Timur Tengah.

Program pengayaan uranium yang dilakukan atau dikembangkan Iran dengan maksud damai yakni memasok energi listrik, menjadi bulan-bulanan bagi dunia internasional khususnya pihak Amerika Serikat, yang merasa curiga bahwa Iran mampu memproduksi senjata nuklir yang dapat membayakan dunia khususnya dapat mengganggu kepentingan mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus berupaya melakukan segala cara agar Iran menghentikan program uraniumnya, baik melalui Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai badan independen yang dapat melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap program pengayaan uranium maupun melalui PBB yang memiliki integritas kuat untuk penyelesaian damai,

dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai.

Resolusi itupun menuai kecaman khususnya pihak Iran sendiri, yang secara terang-terangan telah mempublikasikan bahwa nuklir mereka digunakan untuk tujuan damai. Terdapat beberapa keganjalan dengan dikeluarkannya resolusi pertama Dewan Keamanan PBB (Resolusi DK-PBB Nomor 1737 pada tanggal 23 Desember 2006), yang menyerukan agar Iran menghentikan program uraniumnya. *Pertama*, legitimasi IAEA dan NPT yang merupakan acuan bagi negara-negara yang masuk didalamnya, ternyata tidak mampu memberikan keputusan yang bulat untuk ditaati oleh semua negara yang menandatangani NPT. *Kedua*, terjadi diskriminasi terhadap Israel negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah yang terang-terangan memiliki senjata nuklir namun tidak satu-pun sanksi yang dijatuhkan kepadanya, padahal terdapat seruan bagi negara-negara yang memproduksi atau mengembangkan program uranium untuk bekerja sama dengan IAEA, sehingga dapat dipastikan apakah program pengayaan uranium tersebut digunakan untuk tujuan damai atau

untuk memproduksi senjata nuklir. Sementara itu, pada posisi lain, Iran yang termasuk dalam anggota NPT, sudah menandatangani pasal demi pasal yang dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan itu¹.

Hal ini kemudian mengokohkan sikap Iran untuk tetap mempertahankan atau menentang seruan yang dilancarkan pihak Amerika Serikat, melalui sanksi demi sanksi yang diterimanya oleh Dewan Keamanan PBB. Melihat kondisi ini, Rusia dan Cina sebagai pemegang hak veto menolak untuk memberikan sanksi berikutnya. Mereka berusaha menahan laju pertikaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Selain itu pula, mereka menyekurikan, agar tetap mengedepankan diplomasi atau negosiasi dan bukan diakhiri dengan jalan peperangan, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh semua masyarakat internasional karena nantinya hal tersebut akan berimbas pada kepentingan ekonomi yakni pasokan minyak yang pastinya akan terus melonjak apabila terjadi perang. Cina dan Rusia tetap mendukung Iran

karena mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, sehingga mereka tetap melakukan upaya agar rezim Iran tetap terus berlangsung. Iran merupakan pasar senjata Rusia yang besar, sementara Cina sangat membutuhkan minyak Iran. Kedua negara (Cina dan Iran) telah menandatangani kesepakatan di bidang energi Cina selama 25 tahun². Oleh karena itu, upaya-upaya diplomasi akan terus terbuka melalui forum-forum yang ada guna terhindar dari ancaman peperangan.

Ganjalan lain dirasakan dengan dikeluarkannya resolusi kedua DK PBB Nomor 1747 pada tanggal 24 Maret 2007³ adalah bahwa resolusi terse-

¹ Bandingkan dengan Amerika Serikat, India dan Israel yang tidak mau meratifikasi/menolak bergabung dengan Negara-negara yang termasuk dalam perjanjian non proliferasi/NPT

² Ahmadinejad: *The Nuclaeer Saviour Of Tehran*, Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS & Zionis, Adel El-Gogary, (Daarul Kitab Al -Arabi, Kairo - Damaskus, 2006) terjemahan Tim Kuwais, Editor Cecep Ramli dan Ito, Pustaka II MaN: Depok, April 2007. hlm 314

³ Resolusi DK-PBB Nomor 1747 berisi *pertama*, larangan ekspor senjata Iran; *kedua*, pencekalan pejabat-pejabatnya; *ketiga*, pembekuan tambahan 28 aset-asetnya di luar negeri yang terkait dengan program nuklir; dan *keempat* larangan bantuan keuangan atau pinjaman untuk Teheran dan memberi batas waktu 60 hari kedepan kepada Iran untuk memenuhi tuntutan DK-PBB yaitu menghentikan pengayaan uraniumnya.

but dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan militer Iran yang kemudian memaksa Mahmoud Ahmadinejad berperilaku moderat atau menurunkan nyalinya untuk berperang dengan Amerika Serikat. Apalagi eskalasi politik Amerika Serikat yang telah menuduh Iran melakukan aksi-aksi politik pertahanannya dengan membantu para militansi Taliban di Afghanistan, pasukan Irak yang dikenal dekat dengan para pemimpin kaum Syi'ah Iran dan Hizbullah (Palestina) yang terus berupaya mempertahankan kedaulatan atas serangan tentara Israel dengan memasok senjata yang berkekuatan hulu ledak tinggi yang mampu menghancurkan seluruh pos-pos keamanan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Sehingga, sangat memberikan keyakinan pada Amerika Serikat untuk melegitimasi niatnya menghancurkan segala kekuatan-kekuatan militer Iran melalui tekanan maupun pengaruh masyarakat internasional dengan mengeluarkan sanksi demi sanksi.

yang melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan Iran sebenarnya telah dipahami oleh Presiden Iran, sehingga tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan jika Iran mematuhi seluruh sanksi itu, maka mengharuskan negaranya menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya, sehingga tidak ada alasan lain yang akan diangkat oleh Amerika Serikat selain invasi militer untuk melemahkan Iran sebagaimana serangan yang dilancarkan ke Irak pada tahun 2003 lalu, dengan alasan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Kondisi ini, telah menimbulkan terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan (*balance of power*), yang pada akhirnya negara-negara berusaha untuk saling meningkatkan/mempertahankan kedaulatan negaranya atas dominasi Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.

Pokok Masalah

Seakan membenarkan tuduhan itu, keadaan ini mendorong pengaruh yang datang dari Afghanistan hingga Palestina, Suriah dan Libanon untuk menjadi sekutu utama Iran di Timur Tengah. Skenario Amerika Serikat

1. Bagaimana upaya Amerika Serikat melancarkan "serangan" guna meredam kekuatan Iran di Kawasan Timur Tengah?
2. Bagaimana upaya Iran sebagai ke-

kuatan baru di Kawasan Timur Tengah menghadapi "serangan" Amerika Serikat?

Kerangka Teoritik

Mengamati perkembangan perjuangan kepentingan nasional suatu negara, perlu kiranya mempertimbangkan segenap potensi atau kekuatan/kemampuan suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Kekuatan (*power*) dikerahkan dengan maksud melegitimasi setiap kebijakan untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut. Salah satunya yakni dengan mengerahkan seluruh kemampuan militer untuk dapat bertahan atau untuk menjaga kedaulatan suatu Negara. Dengan kekuatan atau *power* yang dimiliki, maka hal tersebut akan menjadi unsur utama kekuatan bagi suatu negara dalam hal mempertahankan kedaulatan negaranya, baik berupa datangnya ancaman ataupun menghadapi tekanan dari pihak atau negara lain. Di samping itu pula, selain sebagai kekuatan suatu negara, juga merupakan bagian dari pengaruh dan otoritas untuk mempengaruhi pihak lain atau untuk mempertahankan kewenangan tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Coulumbus dan Wolfe (dalam Soeprapto, 1997: 121)⁴ bahwa

"power sebagai payung konsep memiliki tiga unsur yakni, force (kekuatan) yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit, influence (pengaruh) yakni sebagai penggunaan alat-alat persuasi untuk mengubah atau menjaaga perilaku pihak lain dan authority (otoritas) yang didefinisikan adanya kewenangan terhadap pihak lain".

Lebih lanjut, secara realitas *power* hanya bisa diukur atau terlihat dalam tindakan-tindakan yang digunakan oleh negara dengan kekuatan *power* nya terhadap negara atau pihak lain untuk menunjukkan adanya kemampuan karena dimilikinya potensi atau kapasitas untuk melakukan tindakan⁵.

Jika kemudian kekuatan militer sebagai satu-satunya *power* yang menjadi basis kekuatan politik tertinggi, maka sudah barang tentu setiap negara yang mampu mengembangkannya akan menjadi negara terkuat

⁴ Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku, R. Soeprapto: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm 121

⁵ *Ibid*, hlm 122

dalam kancah politik internasional. Dalam konteks ini, maka negara-negara akan melakukan perlombaan senjata, baik dengan meningkatkan anggaran militer, dalam hal kesiapsiagaan militer maupun memproduksi senjata nuklir yang kemudian dipandang sebagai kekuatan baru sebagai proses pergeseran kekuatan nasional suatu negara. Perlombaan senjata tersebut dimaksudkan agar melakukan penyerangan (*ofensif*) maupun pertahanan (*defensif*), yakni agar diperoleh perubahan seperti yang dikehendaki dan dapat mencegah segala macam kemungkinan terjadinya serangan sehingga menangkisnya apabila terjadi serangan.

Perlombaan persenjataan (*arms race*) sebagai suatu instrumen dapat menimbulkan ketakutan atau adanya dilema keamanan (*security dilemma*) bagi suatu negara, dan keadaan seperti ini oleh negara lain ditanggapi sebagai suatu ancaman yang berpotensi jika benar-benar diwujudkan. Oleh sebab itu, setiap negara menaruh perhatian terhadap persenjataan yang sewaktu-waktu ditujukan kepada dirinya. Inipula yang kemudian mendorong negara-negara untuk melakukan hal serupa yakni memperbarui persenjataan dan kesiapsiagaan

militer yang dapat menjamin eksistensi (*survive*) diri atas Negara lain.

Kekuatan militer suatu negara, selain diperlukan dalam perlindungan terhadap keamanan nasional juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan negosiasi terhadap negara lain. Dengan memiliki kekuatan militer yang tangguh, maka negara dapat menghadapi atau melawan setiap ancaman yang dilancarkan terhadap negaranya, dan lebih lanjut mampu memberikan jaminan atas kepentingan-kepentingan nasional negaranya terutama kepentingan-kepentingan yang besar dan vital. Pemeliharaan kepentingan keamanan nasional (*national security*) merupakan kepentingan terdepan dari kepentingan-kepentingan nasional lainnya karena menyangkut sesuatu yang esensial bagi eksistensi negara yaitu kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kekuatan militer seperti itu, dituntut kemampuan negara untuk mengintegrasikan potensi-potensi diberbagai bidang seperti tenaga ahli, ekonomi, industri, sumber daya alam, sumber daya manusia dan wilayah guna mendukung terwujudnya kekuatan militer yang tangguh⁶.

⁶ *Ibid*, hlm 253

Jika terciptanya suatu keadaan dimana terdapat kekuatan militer yang dipandang sama, maka akan terjadi keseimbangan atau yang disebut sebagai *balance of power*. Kondisi seperti ini mengakibatkan dunia dalam keadaan stabil dan sewaktu-waktu akan berubah menjadi tindak kekerasan atau peperangan (*violent*) jika kekuatan militer suatu negara melebihi kekuatan militer negara lain. Oleh sebab itu, *balance of power* sangat diinginkan bagi setiap negara guna menghindari terjadinya kekerasan atau peperangan.

Dalam sistem internasional yang anarkis, stabilitas akan dicapai melalui perimbangan kekuatan (*balance of power*). Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu setiap saat dapat berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pada akhirnya perimbangan baru akan tercipta, apakah melalui jalur damai atau kekerasan (perang). Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengejar atau mempertahankan kekuatan atau sering disebut *struggle for power*.

Peran yang dimainkan suatu negara dalam perimbangan kekuatan dunia atau dalam suatu kawasan/region di-

tentukan oleh kemampuan dan tujuan-tujuannya⁷. Kekuatan atau kekuasaan dimaksud, untuk memberikan jaminan terhadap kebijakan luar negerinya yang dapat memperkirakan secara rasional dan memperhitungkan kerugian dan keuntungan sehubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Atas dasar inilah setiap negara dapat menentukan peranannya dalam perimbangan kekuasaan.

Pembahasan

Dalam upaya yang dilancarkan Amerika Serikat, untuk mempertahankan hegemoninya di dunia internasional, mendapat berbagai tantangan khususnya dengan adanya program pengembangan nuklir Iran, yang merupakan ancaman terbesar dewasa ini. Segera masyarakat internasional tertuju pada sebuah tatanan dunia baru yang melihat bahwa senjata nuklir menjadi basis utama dalam rangka memperkuat pengaruh dan otoritasnya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Sekalipun nuklir ha-

⁷ Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia, Walter S. Jones, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. hlm 39

nya digunakan untuk kepentingan damai namun berpotensi dapat membuat senjata berbahaya yakni senjata nuklir. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi negara-negara yang merasa terancam dengan adanya senjata nuklir, melakukan langkah-langkah/kebijakan konkrit guna mengatasi hal-hal yang dapat saja mengancam kedaulatan, kepentingan dan integritas negaranya.

Keberhasilan kebijakan yang ditempuh Amerika Serikat untuk meredam kekuatan atau ancaman Iran, dianggap sebagai langkah strategis dalam upaya mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara lain, yang mencoba memberikan tekanan (*pressure*). Kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, di samping memiliki kompleksitas kepentingan ekonomi namun sarat akan kepentingan politik yakni perluasan pengaruh dan wilayah, hal ini dibuktikan dengan kuatnya pengaruh Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab (yang menjadi sekutunya yakni Arab Saudi dan Mesir) dan negara non Arab seperti Israel. Tujuan kepentingan ini dimaksudkan agar Amerika Serikat memiliki pengaruh di setiap wilayah di dunia, untuk menjadi basis-basis terpenting dalam men-

jaga dan menjalankan kepentingan nasional negaranya. Hal ini bisa kita lihat adanya pangkalan militer di setiap wilayah yang menjadi eks-kolonialismenya.

Langkah ini dimulai adanya sikap tegas terhadap pengakuan/eksistensi Israel, guna menjadikan sekutunya (Israel) menjadi kekuatan utama/perpanjangan tangan dari kekuatan nasional negaranya di kawasan Timur Tengah. Apapun bentuk dari kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat, akan berujung pada kuatnya pengaruh dan otoritas penuh untuk mem *veto* segala macam sanksi yang dapat mengganggu atau mengancam eksistensi Israel⁸. Oleh karenanya, apapun kebijakan itu, akan berdampak negatif terhadap stabilnya sistem internasional yang berjalan.

Adanya keinginan terhadap stabilnya sistem internasional, harus pula di-

⁸ Bisa dilihat bagaimana pengaruh orang-orang Yahudi (Israel), yang tergabung pada organisasi AIPAC, dalam mempengaruhi setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bacaan lebih lanjut: *The Lobby Israel, Mengungkap Kuasa Yahudi Di Amerika*, terjemahan Raja Ari Hidayat (judul asli *The Israel Lobby and US Foreign Policy*): Penerbit Kalam Indonesia, Jakarta, Januari 2007

dukung oleh keinginan negara-negara maju khususnya Amerika Serikat untuk berperilaku adil terhadap perlakuan yang diterima semua negara. Dengan demikian, akan memudahkan bagi pelaksanaan kepentingan nasional yang diakibatkan adanya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekuatan nasional suatu negara. Namun kondisi ini dapat memberikan gambaran lain, sekiranya ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang diterima suatu negara kemudian dapat menjadi suatu ancaman yang serius. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari polarisasi kekuatan hegemon yang dilancarkan negara adidaya berhadapan dengan polarisasi kekuatan yang diusung negara-negara, khususnya negara-negara berkembang melalui pengembangan nuklir sebagai akibat pergeseran keamanan nasional ala tradisional⁹.

Dugaan kuat Amerika Serikat atas

⁹ Politik Pertahanan dan Kekuatan Militer dianggap *High Power Issues*, dalam perang-perang sebelumnya sehingga dikategorikan sebagai isu tradisional. Ada juga isu-isu non tradisional lainnya yakni yang tergabung kedalam isu-isu selain isu-isu politik pertahanan dan militer atau yang disebut *Soft Power Issues* (ekonomi, demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, dll)

program nuklir Iran yang digunakan untuk pembuatan senjata nuklir, memungkinkan terjadinya pergeseran keamanan nasional yang selama ini hanya dipengaruhi oleh kekuatan/kestabilan politik dan kekuatan militer suatu negara. Sekarang, dengan adanya program nuklir Iran, menambah kekhawatiran, yang kemudian dipersepsikan sebagai sebuah negara yang dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Kekhawatiran ini memaksa bekerjanya spionase Amerika Serikat untuk menjelajahi kekuatan Iran dalam mengembangkan atau memproduksi nuklir untuk tujuan damai atau untuk pembuatan senjata nuklir.

Kekhawatiran ini juga melegitimasi ketakutan Amerika Serikat atas terganggunya rancangan sistem internasional yang dibangunnya, akibat Iran bersikeras menentang setiap kebijakan yang diberlakukan atas negaranya, khususnya kebijakan-kebijakan yang muncul dari sikap arogansi Amerika Serikat. Kekhawatiran ini memang sempat tertutupi jika kita menyaksikan apa yang telah diraih Amerika Serikat atas invasinya ke Irak tahun 2003 lalu. Namun sesungguhnya, kekuatan Amerika Serikat belum cukup untuk secara terang-terangan

membombardir Iran. Jika Amerika Serikat yakin akan memenangkan konflik peperangan yang mungkin dilancarkan ke Iran, maka sudah sejak lama Amerika Serikat telah menghancurkannya, namun kenyataannya Amerika Serikat sendiri belum yakin atas kekuatannya terhadap kekuatan Iran. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus berupaya melakukan berbagai cara untuk melegitimasi setiap kebijakannya agar Iran secara transparan, membuka diri atas kekuatan nuklir atau kemampuan militernya.

Kestabilan ekonomi dan politik Iran yang ditunjang oleh utuh dan solidnya kekuatan militer, memungkinkan Iran secara terang-terangan juga mampu memberikan tekanan-tekanan untuk mempertahankan atau mengamankan kedaulatan negaranya¹⁰. Hal inipula yang mendorong kuatnya suatu negara dalam menentukan arah kebi-

jakan politik luar negerinya. Keadaan ini yang digunakan oleh Iran untuk mempertahankan kepentingan negaranya atas dominasi dan arogansi Amerika Serikat. Apalagi jika kita melihat sepak terjang dan perjuangan yang berbeda-beda dari negara-negara Arab yang pro terhadap Amerika Serikat. Iran selalu bersikap tegas menentang semua ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional negaranya, terlebih dalam menghadapi Israel, yang secara tegas menyatakan akan menghapus Israel dari peta dunia¹¹. Kekuatan Iran untuk menggalang negara-negara Arab pun menjadi langkah strategis yang memungkinkan terjadinya pergeseran kekuatan di Timur Tengah. Meskipun dilatarbelakangi oleh perbedaan agama Islam yakni Islam Syiah Iran dan Islam Sunni oleh kebanyakan negara Arab, yang keduanya sarat akan konflik, namun bisa disatukan

¹⁰ Bandingkan dengan invasi Amerika Serikat atas Irak tahun 2003 lalu, yang hanya mampu menduduki Irak akibat ketidakstabilan politik Irak saat itu. Terjadinya konflik antara kaum syiah dan sunni, sehingga melemahkan kestabilan politik domestik. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Amerika Serikat mencampuri/mengintervensi atas negara lain, dalam hal ini khususnya untuk meredam kekuasaan Saddam Hussein (red: diktator),

mengangkat isu tentang HAM, demokratisasi dan isu senjata pemusnah massal yang sampai saat ini tidak terdapat bukti nyata. Dengan kekuasaan yang dimiliki AS melegitimasi politik unilateral atas kebijakan yang diambil padahal belum ada kesepakatan yang mengikat dari PBB sebagai badan organisasi internasional. PBB tidak memberikan restu kepada AS untuk menyerang Irak.

¹¹ Kompas, edisi Selasa, 27 November 2007

lewat satu kata yakni sama-sama beragama ISLAM. Oleh karena itu, masalah Palestina pun menjadi persoalan umat Islam termasuk negara Revolusi Islam Iran sendiri.

Dengan keberadaan Iran yang berpotensi mengancam dunia terlebih pada kawasan regional Timur Tengah, tentunya membuat kalangan negara-negara Arab pro-Amerika Serikat merasa terancam karena kekuatan nuklir Iran mampu menggeser peta perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Oleh karena itu, Iran sebagai wakil dari negara-negara Islam dan juga mewakili negara-negara berkembang, memiliki kekuatan menentang hegemoni Amerika Serikat, sehingga bisa dijadikan acuan/referensi dalam upaya menjadikan Amerika Serikat sebagai "kawan" atau "lawan".

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan di Timur Tengah juga bisa kita lihat lemahnya pamor negara-negara Arab baik dari sisi militer, politik maupun sosial. Dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein semakin membuktikan lemahnya kekuatan militer Irak saat itu, padahal pada pecahnya perang-perang sebelumnya yakni perang Irak – Iran dan Irak –

Kuwait, seakan menggambarkan kekuatan militer Irak sendiri, sehingga masih teringat dalam pikiran kita bahwa Irak dikenal sebagai "macan" negara-negara Arab dan paling ditakuti. Dari sisi stabilitas politik pun negara-negara Arab mengalami berbagai konflik internal. Seperti adanya perlawanan atau terjadinya konflik Hamas dan Fatah di Palestina, gerakan Hizbullah melawan pasukan Israel di Libanon dan perlawanan Ikhwanul Muslimin di Mesir, menandakan lemahnya dukungan masyarakat atas rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, Iran hadir sebagai kekuatan utama dan berpotensi dalam mempertahankan peta perimbangan kekuatan di Timur Tengah, sebagai bagian memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasional negaranya atas segala ancaman Amerika Serikat yang ingin menguasai dunia.

Kekhawatiran akan terjadinya perang memang sangat beralasan, mengingat situasi perimbangan kekuatan sudah sedemikian terpolarisasi, kekuatan militer Amerika Serikat dengan kekuatan militer Israel di satu sisi dan Iran di sisi lain, yang telah membuktikan kekuatan militernya yang dapat menghancurkan seluruh wilayah

Tel Aviv (Israel)¹². Ketakutan Amerika Serikat untuk menyerang Iran pun cukup beralasan, karena dugaan ketidakpastian mengalahkan Iran, apalagi jika Iran benar-benar mempunyai senjata nuklir. Sehingga politik *preemptive-strike* yang selama ini menjadi andalan Amerika Serikat menjadi “langka” digunakan sebagai akibat ketidakyakinan akan memenangkan peperangan. Faktor kekhawatiran lain yakni jika terjadi perang antara Amerika Serikat dan Iran, maka sudah dapat dipastikan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Kondisi ini, akan berpengaruh pada naiknya Cina sebagai negara adidaya yang selama ini menjadi “musuh” Amerika Serikat karena bangkitnya kekuatan ekonomi, politik maupun militer Cina. Jika hal ini tidak dipertimbangkan oleh Amerika Serikat yang selalu melancarkan politik unilateralnya, maka kepasti-

an akan runtuhnya dominasi Amerika Serikat akan menjadi kenyataan.

Oleh sebab itu, diplomasi atau negosiasi menjadi hal yang harus dikedepankan sebagai cara-cara elegan sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, dan menerima kenyataan akan adanya kekuatan baru yang menjadi penyeimbang atas dominasi sepihak yang dilancarkan Amerika Serikat. Dengan Iran mengembangkan program uraniumnya, maka menyebabkan terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan dan menjadikan kekuatan baru atas peran yang dimainkannya di kawasan Timur Tengah.

Kesimpulan

Kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara untuk memperjuangkan atau untuk mempertahankan kepentingan nasional negaranya, guna menancapkan pengaruh di atas negara-negara lain. Hal ini diperlihatkan oleh Amerika Serikat dengan segala kekuatan nasionalnya, untuk terus menancapkan kekuasaan, pengaruh dan otoritas terhadap negara-negara yang dianggap berlawanan atau berpotensi-

¹² Kemungkinan Suriah juga tidak akan tinggal diam membantu Iran, jika terjadi serangan ke Iran oleh Amerika Serikat, mengingat kedua negara telah menjadi sekutu bersama. Hal inipula mendorong pejuang-pejuang Islam Syiah di Irak dan pasukan Hizbullah di Libanon yang telah membuktikan kepiawaiannya melawan agresi pasukan Israel, untuk turut membantu Iran jika seandainya terjadi perang.

si menjadi ancaman sehingga memungkinkan negaranya untuk melegitimasi setiap kebijakan yang diambil baik itu dilakukan dengan cara-cara damai atau kekerasan. Iran menjadi target utama Amerika Serikat, karena berusaha menentang setiap kebijakan atau sanksi yang diterima sebagai akibat melakukan pengembangan pengayaan uranium yang diduga memproduksi senjata nuklir. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus melakukan cara-cara mendorong dikeluarkannya sanksi dengan maksud melemahkan kekuatan Iran. Atas dasar ini pula, Iran menentang keras setiap kebijakan yang dituduhkan kepadanya, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang. Terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan di Timur Tengah, diakibatkan munculnya Iran sebagai kekuatan baru dengan segenap kekuatan nasional yang dimilikinya dan menurunnya pamor negara-negara Arab untuk menghadapi kekuatan, dominasi, pengaruh dan hegemoni

Amerika Serikat bersama sekutu sepanjang masa yakni Israel. Oleh karena itu, *balance of power* masih sangat diperlukan dalam upaya mencegah dominasi negara lain, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi eskalasi politik dunia internasional. □

Daftar Pustaka

- El-Gogary, Adel, 2007, *Ahmadinejad: The Nucler Saviour Of Tebran, Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS & Zionis*, Editor: Cecep Ramli dan Ito Depok: Pustaka II MaN
- Jones, Walter S, 1993, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soeprapto, 1997, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kompas*, 27 November 2007